



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. HAIRUL RIJAL, S.SOS.,M.SI

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

H. HAIRUL RIJAL, S.SOS.,M.SI
NIP 19700217 199009 1 00

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang dibina Naik Kelas	3,73 %
		Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	3,45 %
2	Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan	Persentase omset usaha pelaku perdagangan yg dibina	1,69 %

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	638.848.255
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	33.968.616
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.005.330.817
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.280.524.893
5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	585.169.813
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	144.370.676
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.353.796
8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	467.581.814
9	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	11.204.873
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.873.329.345

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Bupati TANAH LAUT

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan



H. RAHMAT TRIANTO



H. HAIRUL RIJAL, S.SOS.,M.SI
NIP 19700217 199009 1 00



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LATIP KAMARUDIN, S.AP

Jabatan : Kabid Koperasi usaha Mikro

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si
NIP.19700217 199009 1 001

LATIP KAMARUDIN, S.AP
NIP.19740705 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kelembagaan Koperasi (PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI)	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5
2	- (PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI)	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5
3	Meningkatnya Kelembagaan Koperasi (PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN)	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5
4	- (PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI)	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5
5	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro (PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM))	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang dibina	33,33
6	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan Koperasi (Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota)	Presentase Koperasi Aktif	1,1 %
7	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan Koperasi (Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)	Presentase Koperasi Aktif	1,1 %

8	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan Koperasi (Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota)	Presentase Koperasi Aktif	1,1 %
9	Terlaksananya Peningkatan Pembinaan Usaha Mikro (Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan)	Persentase Usaha Mikro yang terbina	22,08 %
10	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi (Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18 Unit Usaha
11	Terlaksananya pembinaan koperasi (Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota)	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	3 Unit Usaha
12	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi)	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang
13	Terlaksananya fasilitasi legalitas perizinan usaha mikro (Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	110 Unit Usaha

14	Terfasilitasinya akses permodalan usaha mikro (Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro)	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 Orang
15	- (Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 Unit Usaha

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	638.848.255
2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.204.873
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.968.616
4	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.005.330.817
	Sub Kegiatan	
5	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	638.848.255
6	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	11.204.873
7	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	33.968.616
8	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.971.625.384
9	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5.825.000

10	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	27.880.433
	Program	
11	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	638.848.255
12	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	33.968.616
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.005.330.817
14	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	11.204.873

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan

Kabid Koperasi usaha Mikro



H. HAIRUL RIJAL, S.Sos., M.Si
NIP.19700217 199009 1 001



LATIP KAMARUDIN, S.AP
NIP.19740705 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD LUTHFI AKBAR, S.IP

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si
NIP.19700217 199009 1 001

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD LUTHFI AKBAR, S.IP
NIP. 19860415 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,1 Persen
..	-	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.873.329.345

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan



H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si
NIP.19700217 199009 1 001

Sekretaris



MUHAMMAD LUTHFI AKBAR, S.IP
NIP.19860415 200701 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOMMI NAVIRI, S.PD

Jabatan : Kabid Pasar

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si
NIP.19700217 199009 1 001

TOMMI NAVIRI, S.PD
NIP.19801117 200701 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya target penerimaan retribusi pelayanan pasar (PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN)	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	100
2	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana pasar (Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan)	Persentase sarpras pasar dalam kondisi baik	12,38 %
3	Terlaksananya pemungutan wajib retribusi pelayanan pasar (Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya)	Jumlah wajib retribusi pelayanan pasar yang terpungut	1.000.000.000 Rp
4	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi sarpras pasar (Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan)	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit
5	Terlaksananya penertiban dan kebersihan pasar (Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit
6	Terlaksananya penagihan retribusi pelayanan pasar (Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.047.094.893
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	233.430.000
	Sub Kegiatan	
3	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.874.679.325
4	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	172.415.568
5	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	233.430.000
	Program	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.280.524.893

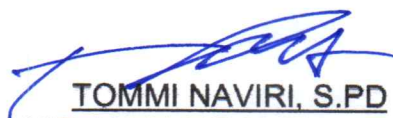
TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan

Kabid Pasar



H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si
NIP.19700217 199009 1 001



TOMMI NAVIRI, S.PD
NIP.19801117 200701 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EDI HARIYADI, SP

Jabatan : Kabid Perdagangan dan Kemetrollogian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. HAIRUL RIJAL, S.Sos.,M.Si
NIP.19700217 199009 1 001

EDI HARIYADI, SP
NIP.19800512 200903 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	- (PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN)	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	73,92
2	Meningkatnya stabilitas harga bapokting (PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING)	Koefisiensi variansi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	0,07
3	Meningkatnya pengembangan ekspor daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR)	Persentase Nilai Net Ekspor	6
4	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen (PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN)	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	73,92
5	Meningkatnya pengembangan ekspor daerah (PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI)	Persentase Nilai Net Ekspor	6
6	Meningkatnya kelancaran arus distribusi bapokting (Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota)	Jumlah ketersediaan bapokting	13 Bapokting
7	Tersedianya informasi harga dan ketersediaan bahan pokok (Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)	Jumlah pemantauan harga bahan pokok di pasar	12 Kali
8	Meningkatnya kualitas produk sesuai kebutuhan ekspor (Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran)	Jumlah produk lulus ekspor	2 Produk

	Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota)		
9	Peningkatan kesadaran pedagang untuk menggunakan UTTP yang memenuhi standar (Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan)	Persentasi Pemilik UTTP yang melakukan Tera/Tera Ulang	73,92 %
10	Meningkatnya Promosi produk unggulan pelaku usaha (Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)	Jumlah produk unggulan yang dipromosikan	30 Produk
11	Menjaga kesetabilan harga dan ketersediaan bapokting (Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan
12	Tersedianya informasi harga dan ketersediaan bahan pokok (Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30 Laporan
13	Terlaksananya operasi pasar (Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan
14	Terlaksananya standarisasi kualitas produk (Pameran Dagang Nasional)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	35 Pelaku Usaha
15	Terlaksananya pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan (Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.100 Unit
16	Terlaksananya pengawasan (Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal)	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	320 Orang
17	Terlaksananya pameran dagang	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan	50 UMKM

	(Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota)	Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	581.519.456
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.650.357
3	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.370.676
4	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	89.353.796
5	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	467.581.814
	Sub Kegiatan	
6	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.176.901
7	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	577.342.555
8	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3.650.357
9	Pameran Dagang Nasional	144.370.676
10	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	40.696.823
11	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	48.656.973
12	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	467.581.814
	Program	
13	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	585.169.813
14	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	144.370.676
15	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	89.353.796
16	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	467.581.814

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan
Perdagangan

Kabid Perdagangan dan Kemetrolagian



H. HAIRUL RIJAL, S.Sos., M.Si
19700217 199009 1 001



EDI HARIYADI, SP
NIP.19800512 200903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HIKMATIAH,A.MD

Jabatan : Kasubbag Umpeg

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Luthfi Akbar, S.IP

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Muhammad Luthfi Akbar, S.IP
NIP.19860415 200701 1 001

HIKMATIAH,A.MD
NIP.19690801 198903 2 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
3	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
4	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
5	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
6	- (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket
7	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang

	(Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi)		
8	- (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
9	- (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
10	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
11	- (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
12	- (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
13	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Penyediaan Bahan/Material)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
14	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu (Fasilitasi Kunjungan Tamu)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
15	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
16	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
17	Terlaksananya Penyediaan Barang Pakai Habis (Pengadaan Mebel)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit
18	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit

19	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Komunikasi, Air dan Listrik (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
20	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
21	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
22	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan operasional (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit
23	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit
24	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana gedung kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
25	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, Gedung serta sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit

	gedung kantor (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya)	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

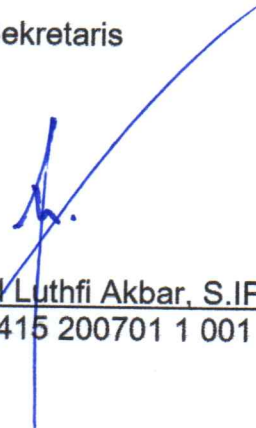
	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	655.773.184
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.565.116
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.173.134.092
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	609.543.574
	Sub Kegiatan	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.991.049
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.666.932
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.328.357
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.633.379
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.100.000
13	Penyediaan Bahan/Material	14.902.472
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.100.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.490.000
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110.560.995
17	Pengadaan Mebel	28.709.595
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.855.521
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.088.134.092
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.500.000

22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	299.145.000
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.653.000
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	232.951.127
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.294.447
	Program	

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Sekretaris

Kasubbag Umpeg


Muhammad Luthfi Akbar, S.IP
NIP.19860415 200701 1 001


HIKMATIAH, A. MD
NIP.19690801 198903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PRANOTO DWI PRASETYO, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Luthfi Akbar, S.IP

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

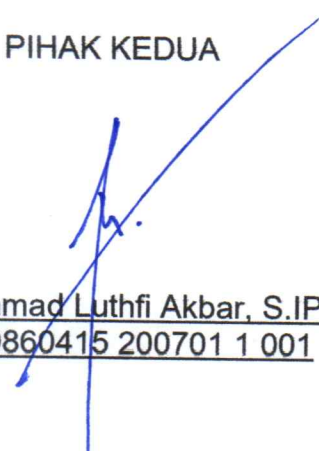
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


Muhammad Luthfi Akbar, S.IP
NIP.19860415 200701 1 001


PRANOTO DWI PRASETYO, SE
NIP.19761126 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
TANAH LAUT

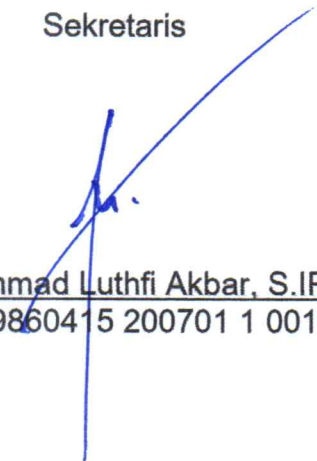
No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	% layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %
3	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	7
4	Tersusunnya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan
6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.624
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.351.313.755
	Sub Kegiatan	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.807
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.817
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.345.314.216
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.999.539
	Program	

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Sekretaris


Muhammad Luthfi Akbar, S.IP
NIP.19860415 200701 1 001


PRANOTO DWI PRASETYO, SE
NIP.19761126 201001 1 003